

TANTANGAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN PETANI KECIL SWADAYA SAWIT DI INDONESIA

ECONOMIC AND INSTITUTIONAL CHALLENGES OF OIL PALM INDEPENDENT SMALLHOLDERS IN INDONESIA

Luci Paongan¹

Program Studi D-III Akuntansi, Politeknik LPP, Yogyakarta

ABSTRACT

Oil palm smallholders (farmers) are the second largest group of palm oil producers in Indonesia. It consists of plasma smallholders namely farmers whose plantation activities are supported or in collaboration with oil palm companies and independent smallholders whose plantation activities are carried out independently. This study aims to determine the economic challenges faced by oil palm independent smallholders as well as institutional challenges and solutions expected by them. This research is an exploratory research with survey method and analyzed by descriptive statistics. Primary data collection was carried out by using a questionnaire method. Research respondents consisted of 109 oil palm independent smallholders in 14 provinces in Indonesia. The aspects surveyed included a general description of the independent smallholder, aspects of economic challenges, institutional aspects and the solutions expected by farmers. The results showed that the main economic challenge faced by independent smallholder of oil palm is the fluctuating and low selling price of fresh fruit bunches (FFB). Most of the farmers do not join farmer organizations because of the unavailability of farmer organizations. The institutional model preference is a farmer-managed cooperative. Solutions expected by farmers include protection of the FFB sale price, availability of farmer institutions, access to palm oil mills, infrastructure improvements and training on good agricultural practices.

Keywords: Economic challenges, oil palm, independent smallholders, institutions.

INTISARI

Petani kelapa sawit merupakan kelompok produsen kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia. Petani kelapa sawit di Indonesia terdiri dari petani plasma yang aktifitas perkebunannya didukung atau bekerjasama dengan perusahaan kelapa sawit dan petani swadaya yang segala aktifitas perkebunannya dilakukan secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan ekonomi yang dihadapi petani kecil swadaya sawit, serta tantangan kelembagaan dan solusi yang diharapkan oleh mereka. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan metode survei dan dianalisa secara statistic deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode kuesioner. Responden penelitian terdiri dari 109 petani kecil swadaya sawit di 14 provinsi di Indonesia. Aspek yang disurvei meliputi gambaran umum petani kecil swadaya sawit, aspek tantangan ekonomi, aspek kelembagaan petani dan solusi yang diharapkan petani. Hasil penelitian menunjukkan tantangan ekonomi utama yang dihadapi petani kecil swadaya sawit adalah harga jual TBS berfluktuasi dan rendah. Sebagian besar petani tidak bergabung dalam organisasi petani karena ketidaktersediaan organisasi petani. Model kelembagaan yang diinginkan petani adalah koperasi yang dikelola oleh petani. Solusi yang diharapkan petani meliputi perlindungan harga jual TBS, tersedianya kelembagaan petani, akses ke pabrik kelapa sawit, perbaikan infrastruktur dan penyuluhan tentang praktek budidaya yang baik.

Kata Kunci: Tantangan Ekonomi, Kelapa Sawit, Petani Swadaya, Kelembagaan

¹ Correspondence author: lcp@polteklnpp.ac.id

PENDAHULUAN

Tiga aktor utama dalam industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah perusahaan perkebunan sawit milik swasta, perusahaan perkebunan milik pemerintah (BUMN) dan petani rakyat. Berdasarkan Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit 2018 – 2020 (Direktorat Jenderal Perkebunan 2019), total luas areal perkebunan kelapa sawit pada tahun 2018 adalah 14.326.350 hektar. Dari total areal tersebut luas areal perkebunan dikelola perusahaan swasta adalah 7.892.706 hektar (55,06%), seluas 5.818.888 hektar (40,62%) dikelola oleh petani dan 614.756 hektar (4,29%) dikelola oleh perusahaan BUMN. Ditinjau dari total luas areal yang dikelola maka petani rakyat merupakan kelompok produsen sawit terbesar kedua di Indonesia. Terdapat dua kelompok utama petani kelapa sawit di Indonesia yakni petani plasma dan petani swadaya. Petani plasma merupakan petani yang memiliki perkebunan sawit yang didirikan oleh perusahaan swasta atau pemerintah dan menggunakan dukungan finansial dari pihak eksternal sedangkan petani swadaya adalah pekebun rakyat yang segala aktifitas perkebunannya dilakukan secara mandiri (*self-organized, self-managed, self-financed*) dan tidak terikat kontrak dengan perusahaan kelapa sawit (Hidayat 2017).

Menurut undang-undang No. 44 Tahun 2014 tentang perkebunan, luas maksimum perkebunan rakyat (petani) adalah 25 ha. Dengan demikian luas kepemilikan lahan yang dimiliki petani bervariasi mulai dari kurang dari 1 hektar hingga 25 hektar. Hal ini berimplikasi pada pengelompokan beberapa jenis petani sawit dalam masyarakat. Idsart dan Schoneveld (2016) dalam penelitiannya di Provinsi Riau membagi petani sawit dalam 3 kelompok utama berdasarkan ukuran kepemilikan lahan yakni petani kecil yakni dengan kepemilikan lahan 0-3 hektar, petani menengah dengan kepemilikan lahan 3,1 – 15 hektar dan petani besar dengan

kepemilikan lahan lebih dari 15 hektar. Idsart dan Schoneveld (2016) menemukan bahwa sebagian besar petani yang mengelola lahan sawit yang diklasifikasikan sebagai lahan untuk budidaya petani kecil sawit tidak tepat diklasifikasikan sebagai petani kecil sawit karena merupakan kelompok produsen yang beroperasi selayaknya bisnis. Kelompok petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 3 ha atau dikategorikan sebagai petani kecil mencakup 66% dari jumlah penduduk namun hanya mengelola 21% lahan, kelompok petani dengan kepemilikan 3,1-15 hektar mengelola 35% lahan dan kelompok petani dengan kepemilikan lebih dari 15 hektar mengelola 44% lahan. Petani yang diteliti dalam penelitian ini adalah petani kecil swadaya sawit dengan luas lahan sawit yang relatif kecil (\pm 0-3 Hektar) dan mengusahakan kelapa sawit secara mandiri (swadaya).

Petani kecil swadaya sawit mengelola input produksi berupa bibit kelapa sawit dan pupuk untuk menghasilkan buah kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS) yang selanjutnya dijual sebagai sumber penghasilan. Namun demikian, petani kecil swadaya sawit di Indonesia diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang kurang menguntungkan ditinjau dari aspek ekonomi. Pramudya et al (2015) menyatakan lima tantangan utama petani swadaya sawit yakni posisi tawar yang lemah karena tidak bisa mempengaruhi bahkan tidak mengetahui proses penentuan harga TBS, menggunakan bibit yang tidak berkualitas sehingga produktivitas rendah, kualitas TBS yang dihasilkan rendah, tidak memiliki legalitas kepemilikan tanah sehingga terlibat dalam konflik pemilikan lahan dan mayoritas petani swadaya tidak berorganisasi sehingga menghambat dalam akses dana, akses pasar dan akses input. Meski menjadi bagian dari rantai pasok global kelapa sawit, posisi petani kecil dalam industri kelapa sawit nasional masih lemah dibanding dengan posisi perusahaan

perkebunan kelapa sawit milik swasta dan BUMN ataupun dengan petani-petani plasma dan petani mandiri besar (Idsert dan Schoneveld 2016; Inobu 2016).

Dari segi kelembagaan, usaha perkebunan yang dikelola petani biasanya tidak berbadan hukum dan dikelola sendiri dengan menggunakan tenaga kerja keluarga. Petani kelapa sawit melakukan budidaya kelapa sawit berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki tanpa mengikuti pelatihan dan penyuluhan mengenai budidaya kelapa sawit. Berdasarkan kondisi diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui tantangan ekonomi yang dihadapi petani kecil swadaya sawit dari perspektif para petani dan solusi yang mereka harapkan, mengetahui tantangan kelembagaan dan penyebab petani kecil swadaya sawit tidak bergabung dalam suatu lembaga pekebun serta untuk mengetahui solusi yang diharapkan oleh petani kecil swadaya sawit dari perspektif petani. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang meneliti petani secara umum atau petani kecil swadaya di satu atau dua wilayah tertentu maka penelitian ini meneliti petani kecil swadaya yang berasal dari 14 provinsi di Indonesia.

METODOLOGI

Responden pada penelitian ini adalah 109 petani kecil swadaya sawit yang berasal dari 14 provinsi di Indonesia. Terdapat 55,96% responden berasal dari 2 provinsi sentra perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia yakni Provinsi Sumatera Utara dan Riau, 11,01% responden berasal dari Provinsi Jambi dan 9,18% dari Kalimantan Barat. Sementara itu, 23,85% responden lainnya tersebar di 10 provinsi di Indonesia yakni Aceh (6,42%), Sumatera Barat (2,75%), Bengkulu (0,92%), Sumatera Selatan (0,92%), Bangka Belitung (0,92%), Kep. Bangka Belitung (0,92%), Lampung (2,75%), Kalimantan Selatan (0,92%), Kalimantan Tengah (0,92%), Kalimantan Timur (4,59%). Dalam penelitian ini, pengumpulan

data primer dilakukan pada Desember 2019 dengan metode angket (kuesioner).

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan metode survei. Metode survei merupakan suatu cara pengambilan sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Metode survei merupakan metode paling baik guna memperoleh dan mengumpulkan data asli untuk mendeskripsikan keadaan populasi (Sukardi 2017). Data dianalisa secara statistik deskriptif untuk mengetahui karakteristik petani kecil swadaya sawit (umur, pendidikan, jumlah tanggungan, penduduk asli/pendatang, komoditi lain yang diusahakan, pekerjaan/usaha lain) dan profil kebun petani (luas areal, umur tanaman, harga jual TBS, rata-rata produksi, rata-rata penjualan, jarak ke pabrik kelapa sawit). Tantangan ekonomi yang disurvei meliputi harga jual TBS, akses pasar, akses dana, daya beli input produksi dan aspek kelembagaan yang disurvei meliputi keikutsertaan dalam organisasi petani sawit, alasan tidak bergabung dalam organisasi petani sawit, model kelembagaan dan solusi yang diharapkan petani kecil swadaya sawit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar petani kecil swadaya sawit pada penelitian ini telah mengikuti pendidikan formal dengan jumlah tertinggi menempuh pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar sebesar 39% disusul dengan lulusan pendidikan tingkat atas SMA/SMK 28% dan pendidikan tingkat menengah SMP 19%, terdapat 9,17% yang telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan hanya sebagian kecil (3,67%) yang tidak tamat SD. Rata-rata umur petani kecil swadaya sawit adalah 51,26 tahun, 54% merupakan penduduk asli setempat dengan jumlah anggota keluarga yang ditanggung rata-rata 5 orang per petani. Rata-rata luas lahan kebun sawit yang dikelola adalah seluas 2,35 hektar dan tanaman kelapa

sawit yang dibudidayakan rata-rata berumur 12,26 tahun. Rata-rata produksi TBS per bulan berkisar pada angka 1,73 ton dengan rata-rata harga jual TBS per kg pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 1.304,4/kg. Adapun harga jual TBS sangat bervariasi antara Rp. 700,00/kg hingga Rp. 1.760,00/kg. Hasil yang didapatkan petani dari penjualan TBS per bulan rata-rata Rp. 2.282.384,91. Jarak lahan petani ke pabrik kelapa sawit (PKS) terdekat cukup bervariasi dengan rata-rata berjarak 18,91 km. Sebanyak

41% petani mengusahakan komoditi lain seperti karet, kakao, kopi, kemiri, cengkeh, lada, jeruk nipis, rambutan, duku, ubi kayu, jagung, nanas dan kacang tanah sebagai sumber penghasilan tambahan. Selain itu, 59% petani memiliki usaha/pekerjaan lain seperti usaha dagang, bengkel/reparasi, beternak, buruh hingga karyawan pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tantangan Ekonomi Petani Kecil Swadaya Sawit

Tabel 1. Hasil Survei Tantangan Ekonomi Petani Kecil Swadaya Sawit

No	Uraian	Deskripsi	“Ya” (%)
Harga Jual			
1	Harga jual TBS stabil	1=Ya; 0=Tidak	15
2	Harga jual saat ini menguntungkan	1=Ya; 0=Tidak	70
Akses Pasar			
3	Petani mudah mendapatkan pembeli TBS	1=Ya; 0=Tidak	94
4	Petani menjual TBS ke pengepul/tengkulak	1=Ya; 0=Tidak	91
5	Petani menjual TBS ke Pabrik Kelapa Sawit	1=Ya; 0=Tidak	11
6	Lokasi penjualan TBS mudah dijangkau	1=Ya; 0=Tidak	82
7	Petani menerima pembayaran pada saat transaksi	1=Ya; 0=Tidak	79
8	Harga yang ditetapkan pembeli sesuai dengan harapan petani	1=Ya; 0=Tidak	25
Akses Dana			
9	Dana sendiri	1=Ya; 0=Tidak	94
10	Pinjaman dari keluarga/kerabat/teman	1=Ya; 0=Tidak	22
11	Pinjaman dari koperasi/bank/lembaga keuangan lainnya	1=Ya; 0=Tidak	17
12	Pinjaman dari pengepul TBS	1=Ya; 0=Tidak	25
Daya Beli Input Produksi			
13	Harga bibit unggul tidak terjangkau	1=Ya; 0=Tidak	70
14	Harga pupuk tidak terjangkau	1=Ya; 0=Tidak	65
15	Dana tidak mencukupi untuk mengelola kebun	1=Ya; 0=Tidak	72

Harga Jual TBS

Berdasarkan survei pada Tabel 1, hanya 15% dari petani kecil swadaya sawit yang menilai jika harga jual TBS stabil dan 85% lainnya menilai harga jual TBS tidak stabil (berfluktuasi). Petani kecil swadaya sawit mengeluhkan harga jual TBS yang tidak stabil dan dapat turun drastis ke harga Rp. 200,00 per kg. Hal ini menjadi tantangan petani kecil swadaya sawit yang sebagian besar berharap agar harga jual TBS dapat lebih stabil karena pendapatan petani bergantung pada harga jual TBS. Menurut Pohan (2015), tantangan terbesar yang dihadapi oleh petani sawit swadaya adalah fluktuasi atau harga jual TBS yang tidak stabil memiliki dampak yang cukup besar terhadap kondisi sosial ekonomi petani. Harga jual TBS yang selalu berubah-ubah mempengaruhi tingkat pendapatan petani dan menjadi beban bagi petani (Absharina et al 2023).

Petani kecil swadaya sawit juga mengeluhkan harga jual TBS yang berbeda secara signifikan antara satu agen/perusahaan dengan yang lainnya walaupun berada dalam wilayah yang sama. Hasil survei menunjukkan harga jual TBS yang diterima petani pada saat survei dilakukan sangat bervariasi dari harga terendah Rp. 700/kg hingga harga tertinggi Rp. 1.760/kg. Hal ini menunjukkan terjadinya asimetri informasi harga TBS di kalangan petani sekaligus mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penetapan harga TBS. Harga jual TBS yang diterima petani rata-rata berada di harga Rp. 1.304,46/kg. Menurut 70% petani kecil swadaya sawit, harga jual tersebut cukup menguntungkan. Namun demikian, sekalipun harga jual TBS sebesar Rp. 1.304,46/kg cukup menguntungkan tetapi tidak ada jaminan harga TBS pada level ini akan terus stabil. Sebagian besar petani juga menilai harga jual TBS yang diterima tersebut tidak sesuai dengan harapan karena harga jual yang diterima petani lebih

rendah daripada standar harga yang ditetapkan atau berlaku bagi pihak lain. Wildayana (2016) menyatakan bahwa walaupun tidak terdapat perbedaan produksi TBS yang signifikan namun pendapatan penjualan TBS petani plasma dan petani mandiri berbeda secara signifikan karena perbedaan harga TBS yang diterima.

Hasil penjualan TBS per bulan rata-rata sebesar Rp. 2.282.384,91 sebelum dipotong dengan biaya-biaya pengusahaan sawit yang dikeluarkan dimana jumlah ini merupakan pendapatan kotor petani kecil sawit swadaya pada saat harga jual TBS relatif tinggi yakni Rp. 1.304,46 / kg. Pada saat harga jual TBS turun maka jumlah yang didapatkan petani juga menjadi lebih rendah. Dengan pendapatan yang tidak pasti dari penjualan TBS, petani kecil swadaya sawit diperhadapkan pada biaya pengusahaan sawit yang cukup tinggi sekaligus kebutuhan untuk menghidupi rata-rata 5 orang anggota keluarga. Hal ini menjadikan para petani kecil swadaya sawit mengupayakan sumber penghasilan alternatif dengan menanam komoditi lain (41% petani) dan memiliki pekerjaan/usaha lain selain berkebun sawit (59% petani). Hasil ini sejalan dengan Absharina et al (2023) yang menyatakan bahwa petani mencari alternatif lain untuk menambah pendapatan guna mengantisipasi harga jual TBS yang berubah-ubah. Data ini menunjukkan dari sudut pandang petani bahwa hanya bertani sawit saja belum bisa diandalkan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi petani, keuntungan secara keuangan menjadi hal terpenting dan merupakan motivasi utama untuk dapat berpartisipasi dalam sertifikasi berkelanjutan (Hidayat et al. 2015) dengan demikian permasalahan perekonomian petani perlu diselesaikan sebelum dapat mengatasi isu keberlanjutan pada sisi petani.

Akses Pasar

Petani kecil swadaya sawit cenderung tidak mengalami kendala dalam menjual hasil panen, hal ini ditunjukkan dengan hasil survei pada Tabel 1 yakni 94% petani kecil swadaya sawit mudah untuk mendapatkan pembeli. Dalam hal ini, petani kecil swadaya sawit menjual hasil panennya kepada pengepul/tengkulak/agen (91%) dan/atau ke pabrik kelapa sawit/PKS (11%). Lokasi untuk melakukan transaksi penjualan juga mudah dijangkau oleh 82% petani kecil swadaya sawit. Sebanyak 79% petani kecil swadaya sawit juga menerima pembayaran atas penjualan TBS pada saat transaksi. Hanya 11% petani dalam penelitian ini yang memiliki akses untuk menjual TBS langsung ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menunjukkan bahwa sebagian besar petani kecil swadaya sawit mengandalkan agen/tengkulak untuk membeli TBS mereka, berbeda dengan petani besar yang dapat mengontrol penjualan TBSnya ataupun petani plasma yang memiliki akses ke PKS. Inobu (2016) menemukan bahwa jarang sekali petani kecil swadaya sawit yang menjual TBS langsung ke pabrik kelapa sawit.

Meskipun petani kecil swadaya sawit dapat mengamankan penjualan TBSnya kepada pembeli dan hampir semua (94%) petani tidak kesulitan untuk mendapatkan pembeli tetap namun harga yang ditetapkan pembeli dalam hal ini pengepul/tengkulak/agen dan pabrik kelapa sawit belum sesuai dengan harapan 75% petani kecil swadaya sawit. Angka ini menunjukkan ketidakpuasan petani kecil swadaya sawit terhadap harga jual TBS yang diterima. Hal ini ditambah dengan rata-rata jarak lahan petani ke PKS yang cukup jauh yakni 18,91 km dengan infrastruktur jalan yang belum memadai sehingga sulit dilalui kendaraan dan menjadikan biaya transportasi lebih tinggi. Sementara itu, kualitas TBS yang tidak langsung masuk ke pabrik akan menurun dan pada akhirnya berimplikasi pada harga jual TBS yang lebih rendah. Semua ini kembali menjadi beban bagi

petani yang mengurangi pendapatan mereka dari hasil penjualan TBS.

Akses Dana

Tabel 1 menunjukkan hampir seluruh petani kecil swadaya (94%) mengusahakan kebun sawit dengan dana mandiri (*self funding*) dan sebagian kecil (6%) mendapatkan pendanaan dari pinjaman. Hasil survei juga menunjukkan terdapat 22-25% petani yang menggunakan pendanaan campuran (*mix funding*) baik dari dana sendiri dan sumber lain yakni sumber pinjaman informal seperti keluarga/teman dan tengkulak. Jumlah petani yang mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan formal seperti bank/koperasi/lembaga keuangan lainnya lebih sedikit yakni hanya 17%. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sahara et al (2018) yang menunjukkan bahwa sejumlah petani kecil swadaya sawit mengakses pinjaman informal melalui pedagang lokal (tengkulak/pengepul TBS) karena walaupun nilai/jumlahnya terbatas namun petani tidak diberi persyaratan khusus seperti periode kredit/tenor, biaya ataupun bunga dan hanya sebatas perjanjian lisan. Skema pembiayaan ini mudah dan terjangkau bagi petani kecil swadaya karena untuk pembayarannya pun dapat dilakukan petani setiap kali menjual TBS. Hutabarat (2017) juga menemukan bahwa lembaga keuangan umumnya tidak memberikan pinjaman kepada petani kecil swadaya sawit karena risiko gagal bayar yang dianggap cukup besar. Petani umumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak ada kelebihan pendapatan untuk dapat membayar cicilan atau bunga pinjaman. Kondisi yang dihadapi petani kecil swadaya sawit sedikit berbeda dengan petani plasma yang dapat mengakses pinjaman melalui koperasi dan perusahaan inti sawit ataupun ke bank dengan penjamin yakni koperasi atau perusahaan. Daemeter (2015) menyatakan bahwa petani kecil swadaya hanya dapat mengakses pinjaman

informal dari agen (tengkulak/pengepul) atau juga berpotensi untuk mendapatkan pinjaman dari *credit union* setempat. Inobu (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa hanya 13,8% petani memiliki tabungan di bank dan hanya 7,7% memiliki akses terhadap pinjaman bank. Hasil diatas menunjukkan jika petani kecil swadaya sawit memiliki akses dana untuk pinjaman/pendanaan yang terbatas.

Daya Beli Input Produksi

Survei pada Tabel 1 menunjukkan 70% petani kecil swadaya sawit menilai harga bibit kelapa sawit tidak terjangkau dan 65% menilai harga pupuk tidak terjangkau. Sebanyak 72% petani menyatakan jika dana yang mereka gunakan yang sebagian besar bersumber dari dana mandiri tidak mencukupi untuk mengelola kebun sawit mereka. Petani kecil swadaya sawit tidak hanya mengeluhkan harga bibit unggul dan pupuk yang mahal tetapi juga akses ketersediaan pupuk yang juga tidak mudah didapatkan oleh petani kecil swadaya sawit. Hal tersebut menjadi kendala bagi petani sehingga tidak dapat memenuhi praktik budidaya yang baik sesuai dengan standar seharusnya.

Dengan dana mandiri maupun dana campuran (*mix funding*) yang dimiliki saat ini, 72% petani menyatakan jika dana tersebut tidak mencukupi untuk mengelola kebun sawit

termasuk kendala untuk pengadaan bibit unggul dan pupuk. Modal kerja yang terbatas dan pendapatan dari penjualan TBS yang berfluktuasi berimplikasi pada daya beli input produksi rendah sementara harga input produksi seperti bibit dan pupuk tinggi. Hal ini menjadi lebih kompleks lagi karena akses bibit dan pupuk juga sangat terbatas bagi petani kecil swadaya sawit sehingga sekalipun bagi sebagian petani (30-35%) dapat membeli input produksi namun terkendala bibit dan pupuk yang sulit diperoleh. Hasil ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya yakni mayoritas petani swadaya di wilayah yang diteliti Sahara et al. (2018) menghadapi kendala modal untuk membeli input berkualitas tinggi seperti bibit bersertifikat. Kemampuan finansial petani swadaya yang rendah menyebabkan pengadaan faktor produksi tidak bisa dipenuhi sesuai dengan standar yang seharusnya (Hutabarat 2017a). Hutabarat (2017a) menyatakan bahwa akses input produksi seperti bibit unggul dan pupuk harganya cukup mahal dan sangat sulit diperoleh. Pada umumnya rantai pasok pupuk hanya diperoleh melalui saluran-saluran tertentu seperti perusahaan perkebunan, koperasi dan agen-agen yang terbatas. Inobu (2016) menemukan bahwa sumber utama dari sebagian besar petani swadaya untuk mendapatkan pupuk adalah melalui pengepul/tengkulak yang membeli TBS petani.

Tantangan Kelembagaan

Tabel 2. Organisasi Petani Sawit

No	Uraian	Jumlah (%)
Keikutsertaan Petani dalam Organisasi Petani Sawit		
1	Petani berorganisasi	22,94
2	Petani tidak berorganisasi	77,06
Alasan Petani Tidak Berorganisasai		
3	Belum ada organisasi petani kelapa sawit	46,44
4	Memilih untuk mandiri/tidak bergabung	30,95
5	Tidak diikutsertakan oleh organisasi setempat	4,76
6	Ketidaktahuan akan adanya organisasi petani kelapa sawit	4,76
7	Tidak memberi penjelasan	13,09

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar petani kecil swadaya sawit tidak bergabung dalam organisasi petani sawit. Alasan terbesar tidak bergabungnya petani kecil swadaya sawit dalam organisasi petani sawit adalah karena belum adanya organisasi petani kelapa sawit di daerah mereka. Hal ini menunjukkan jika sebagian besar petani kecil swadaya sawit tidak berorganisasi bukan karena enggan untuk bergabung. Disisi lain, bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk petani sawit disalurkan secara tidak secara langsung kepada petani sawit melalui kelembagaan petani seperti koperasi/asosiasi ataupun melalui perusahaan yang memiliki kontrak kerjasama dengan petani/kelompok tani. Temuan ini sejalan dengan Sibarani et al (2015) yang mengemukakan bahwa petani tidak berorganisasi karena para petani tidak membentuk kelompok tani atau kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani kelapa sawit swadaya. Hal ini menjadikan posisi sebagian besar (77,06%) petani kecil swadaya sawit lebih lemah karena tidak memiliki akses penting untuk mendapatkan intervensi dari pemerintah guna mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi petani sawit. Sementara itu, akses input, akses finansial, akses pasar, keterampilan manajerial, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai bagi para petani kecil swadaya yang menurut penelitian lebih memungkinkan dicapai apabila petani bergabung dalam organisasi pekebun (Sahara et al 2018).

Model Kelembagaan yang Diinginkan Petani

Model kelembagaan yang diinginkan petani kecil swadaya sawit disurvei dengan memberikan tujuh (7) pilihan model kelembagaan yakni (a) Mandiri, tidak bergabung dalam kelembagaan pekebun apapun; (b) Sistem plasma, kemitraan petani dengan perusahaan/pabrik kelapa sawit; (c) Koperasi A: Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola

secara mandiri oleh para petani kelapa sawit; (d) Koperasi B: Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh pemerintah desa setempat; (e) Koperasi C: Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh perusahaan/pabrik kelapa sawit; (f) Koperasi D: Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat / LSM; (g) Model kelembagaan lainnya yang diusulkan petani.

Dari ketujuh pilihan diatas, secara berurutan, 29% petani memilih model kelembagaan Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola secara mandiri oleh para petani kelapa sawit (Koperasi A), 21% petani memilih menjadi petani mandiri yang tidak bergabung dalam kelembagaan pekebun apapun, 16% petani memilih Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat / LSM (Koperasi D), 15% memilih sistem plasma, 13% memilih Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh pemerintah desa setempat (Koperasi B), 6% memilih Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh perusahaan/pabrik kelapa sawit (Koperasi C) dan tidak ada usulan untuk model kelembagaan lainnya yang diinginkan.

Dari perspektif petani kecil swadaya sawit, model kelembagaan Koperasi A yakni organisasi yang dikelola secara mandiri oleh petani kelapa sawit menjadi pilihan utama (29%) dibandingkan dengan model kelembagaan lainnya. Model Koperasi A ini kemungkinan dinilai petani kecil swadaya sawit sebagai lembaga yang paling potensial untuk menjawab tantangan petani, membawa keuntungan yang terbaik dan memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan model kelembagaan lainnya yang kurang difavoritkan. Penelitian Suharno et al. (2015) di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dikelola oleh koperasi milik petani merupakan pola yang paling menguntungkan dibandingkan pola kemitraan yang dikelola oleh perusahaan

atau oleh petani individual. Sedikitnya petani yang memilih model organisasi yang dikelola oleh perusahaan/pabrik kelapa sawit mengindikasikan rendahnya kepercayaan petani kecil swadaya sawit pada perusahaan kelapa sawit. Gunawan et al. (2018) menemukan bahwa dari tiga pola kemitraan yakni Perkebunan Inti Rakyat (PIR), pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KPPA) dan Pola Satu Manajemen (PSM) maka pola KPPA dan PSM yang dikelola penuh oleh perusahaan sawit menjadi pola kemitraan yang menimbulkan banyak permasalahan sehingga membuat petani enggan untuk bergabung.

Solusi yang Diharapkan Petani Kecil Swadaya Sawit

Pada kuesioner survei, petani kecil swadaya sawit diberikan pertanyaan terbuka berupa solusi yang diharapkan para petani kecil swadaya sawit baik secara umum maupun secara khusus dari pemerintah (pusat/daerah) dan dari perusahaan/pabrik kelapa sawit dengan hasil dan pembahasan sebagai berikut:

Perlindungan Harga Jual TBS

Solusi terbanyak yang diharapkan petani kecil swadaya sawit kepada pemerintah adalah jaminan harga jual TBS yang stabil. Harga jual TBS berpengaruh nyata dan signifikan terhadap pendapatan petani kelapa sawit (Anggraeni et al., 2022). Dengan harga jual TBS yang stabil maka pendapatan petani akan lebih stabil. Wildayana (2016) menjelaskan bahwa masing-masing daerah memiliki kebijakan dalam menentukan harga TBS sehingga terdapat perbedaan harga, hal ini juga yang menyebabkan rentannya terjadi permainan harga pada pekebun swadaya. Dalam penelitian tersebut, Wildayana (2016) menemukan bahwa sekalipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara produksi TBS petani plasma dan petani swadaya namun petani plasma mendapatkan pendapatan yang berbeda nyata karena memperoleh harga jual Rp.

1.434,00/kg TBS sementara petani swadaya mendapatkan harga jual Rp. 1.184,00/kg atau terdapat selisih Rp.250,00/kg TBS. Untuk itu, Wildayana (2016) juga merekomendasikan agar pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga TBS untuk semua petani kelapa sawit.

Harga Input Produksi Terjangkau

Petani juga berharap pemerintah menjadikan harga pupuk dan benih lebih terjangkau dan mudah diakses oleh petani serta adanya subsidi berupa pupuk, obat-obatan kimia (*chemist*) dan benih bersertifikat bagi petani. Penyaluran subsidi/bantuan kepada petani sawit telah dilakukan pemerintah ataupun perusahaan dengan menyalurkannya melalui kelembagaan petani seperti asosiasi, koperasi, kelompok tani. Namun demikian, bantuan/subsidi yang menjangkau petani kecil swadaya sawit masih minim karena sebagian besar petani kecil swadaya sawit belum tergabung dalam suatu organisasi petani sawit. Ketika pemerintah menetapkan untuk menyalurkan dukungan dan bantuan kepada petani melalui lembaga/organisasi petani seharusnya pemerintah juga memastikan para petani khususnya petani kecil swadaya sawit memiliki akses kelembagaan/organisasi dan mendapatkan pemberdayaan terkait penguatan kelembagaan. Temuan dalam penelitian ini adalah sebagian besar petani kecil swadaya sawit tidak berorganisasi karena ketidaktersediaan lembaga/organisasi petani di wilayah mereka. Menurut Pramudya et al (2015), akses pasar, akses input produksi seperti akses bibit bersertifikat dan pupuk bersubsidi mungkin hanya dapat diperoleh melalui organisasi petani.

Akses ke PKS dan perbaikan infrastruktur

Petani kecil swadaya sawit mengharapkan dukungan dari perusahaan/pabrik kelapa sawit berupa akses yang lebih terbuka kepada petani swadaya agar petani swadaya dapat menjual TBS secara langsung kepada PKS,

keterbukaan/transparansi timbangan pihak pabrik kelapa sawit sebagai pembeli dan adanya kesamaan harga antara pabrik satu dengan yang lainnya. Menurut Hutabarat (2017), petani swadaya menjadi sulit mendapatkan harga tinggi karena perusahaan pada umumnya menetapkan harga yang lebih rendah untuk TBS dari kebun swadaya. Lebih lanjut menurut Sahara et al (2018) petani swadaya menerima harga TBS lebih rendah dibandingkan petani plasma karena petani plasma memiliki kontrak resmi dengan perusahaan sawit dan mengikuti harga yang ditetapkan oleh Disbun provinsi.

Petani kecil swadaya sawit berharap pemerintah memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah perkebunan sawit petani kecil swadaya sawit untuk mendukung proses transportasi yang lebih memadai serta dapat menekan biaya transportasi yang tinggi karena kondisi jalanan yang sulit dilalui kendaraan bermotor. Pemerintah telah melakukan perbaikan infrastruktur namun belum optimal karena sebagian besar kondisi infrastruktur jalan/jembatan belum memadai dan terdapat perbaikan jalan masih dilakukan secara swadaya oleh para petani dengan mengeluarkan biaya sendiri yang cukup memberatkan bagi petani kecil swadaya sawit. Selain itu, kepada semua pihak yang berkepentingan, petani swadaya berharap agar lokasi PKS dapat lebih dekat dengan lokasi perkebunan petani kecil swadaya sawit untuk mengurangi biaya transportasi yang mahal. Hal ini dapat menjadi perhatian penting bagi investor, perusahaan perkebunan dan pemerintah lokal/setempat (BUMD) untuk dapat membangun PKS di sekitar area petani sawit dan tidak tertutup kemungkinan organisasi/koperasi petani yang dikelola dengan baik dan mendapatkan dukungan dari semua pihak dapat memiliki PKS sendiri.

Penyuluhan Praktik Budidaya yang Baik

Petani kecil swadaya sawit mengharapkan dukungan dari semua pihak terkait dalam bentuk

penyuluhan/pelatihan tentang budidaya sawit secara menyeluruh dari proses pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan hingga panen dan pasca panen. Dengan kondisi pendidikan petani kecil swadaya sawit yang rata-rata rendah yakni 39% lulus Sekolah Dasar, dukungan berupa pelatihan dan penyuluhan mereka harapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka tentang praktik budidaya sawit yang baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi sawit yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan yang diperoleh petani kecil swadaya sawit. Pengetahuan petani yang rendah tentang tanaman kelapa sawit menyebabkan perkebunan kelapa sawit dikelola dengan praktik-praktik budidaya yang kurang baik (Hutabarat 2017b). Namun hal ini dapat diatasi dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan yang memadai bagi petani kecil swadaya sawit. Dalam penelitian ini petani kecil swadaya sawit mempertanyakan harga jual TBS yang berbeda-beda dalam wilayah dan perusahaan yang sama mengindikasikan petani belum memahami jika kondisi kebun yang berbeda (varietas bibit yang ditanam bermacam-macam dan perawatan yang seadanya) berimplikasi pada kualitas TBS yang dihasilkan akan bervariasi sehingga mempengaruhi harga jualnya. Dengan dukungan berupa penyuluhan praktik budidaya yang baik dan meningkatkan kemampuan ekonomi petani kecil swadaya sawit maka para petani kecil swadaya sawit dapat melakukan langkah-langkah perbaikan dalam input produksinya sehingga dapat meningkatkan produktifitas hasil TBSnya. Kolaborasi pemerintah, perusahaan, LSM dan perguruan tinggi seharusnya membawa kontribusi nyata bagi kemajuan petani sawit Indonesia melalui proses pemberdayaan petani sawit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tantangan ekonomi utama yang dihadapi petani kecil swadaya sawit adalah harga jual

TBS yang fluktuatif. Akses pasar untuk menjual TBS mudah namun harga jual sawit yang diterima belum sesuai dengan harapan petani. Sebanyak 94% petani mengusahakan kebun sawit dengan dana mandiri, akses dana berupa pinjaman masih terbatas sementara dana mandiri tersebut tidak mencukupi untuk pengusahaan lahan. Petani tidak bergabung dengan organisasi petani karena tidak tersedianya organisasi petani. Model kelembagaan yang diinginkan adalah koperasi petani sawit yang dikelola oleh petani. Solusi utama yang diharapkan petani adalah perlindungan harga jual TBS, ketersediaan kelembagaan petani, akses ke PKS, perbaikan infrastruktur dan penyuluhan praktik pertanian yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik LPP Yogyakarta yang telah mendanai penelitian ini dan kepada mahasiswa Politeknik LPP penerima beasiswa BPDP-KS beserta orang tuanya yakni petani kecil swadaya sawit yang telah berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Absharina A, Lifianthi, Sari DW. (2023). Pendapatan Petani Kelapa Sawit Swadaya Terhadap Kegiatan Usahatani Umur Tanaman Produktif dan Non Produktif Di Desa Sungai Rengit Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Pertanian Agros*, 25(1), 169-180.
- Anggraeni R, Sulistiya, Pratama AP. (2022). Analisis Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Usaha Tani Kelapa Sawit Pola Swadaya Di Desa Anyar Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Pertanian Agros*, 24 (2), 663-671.
- Agustira MA, Amalia R, Nurkhoiry R. (2015). Program Sawit Untuk Rakyat (PROWITRA) sebagai upaya peningkatan produktivitas, pemberdayaan, keberlanjutan, dan kesejahteraan pekebun kelapa sawit rakyat. Prosiding Seminar Nasional “Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian dalam Rangka Pencapaian Kemandirian Pangan Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Petani”: 315-24. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Daemeter Consulting. (2015). *Indonesia oil palm smallholder farmers: a typology of organizational models, needs, and investment opportunities*. Bogor (ID): Daemeter Consulting
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2019). *Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit 2018 – 2020* Jakarta (ID): Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
- Gunawan, Talman P, Tirayoh J, Andri M, Syamsitro Z. (2018). *Standar HAM dalam Kemitraan Usaha Perkebunan Sawit*. Bogor (ID): Serikat Petani Kelapa Sawit.
- Hidayat NK. (2017). *Tinjauan Buku: menghijaukan sektor sawit melalui petani, lesson-learned Hivos untuk isu sawit berkelanjutan*. Masyarakat Indonesia 43(1): 143-149
- Hidayat NK, Offermans A, Glasbergen P. (2016). On the profitability of sustainability certification: An analysis among Indonesian Palm Oil Smallholders. *Journal of Economics and Sustainable Development* 7(12): 45-62. https://iiste.org/Journals/index.php/JED_S/article/view/33228/34126
- Hutabarat S. (2017a). Tantangan keberlanjutan pekebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam perubahan perdagangan global.

- Masyarakat Indonesia* 43(1): 47-64.
<https://doi.org/10.14203/jmi.v43i1.713>
- Hutabarat S. (2017b). ISPO certification and Indonesian oil palm competitiveness in global market smallholder challenges toward ISPO certification. *Agro Ekonomi* 28(2): 170-188. <https://doi.org/10.22146/jae.27789>
- Idsert J dan Schoneveld GC. (2016). *Mewujudkan petani kecil sawit mandiri yang lebih produktif dan berkelanjutan di Indonesia*. Working Paper 217. Bogor (ID): CIFOR
- [INOBU] Institut Penelitian Inovasi Bumi. (2016). *Seluk beluk pekebun kelapa sawit dan tantangan budidaya sawit secara swadaya: studi kasus Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia*. Jakarta (ID): Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU).
- Pohan M. (2015). Dampak penurunan harga sawit terhadap kesejahteraan petani sawit di pantai timur Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan* 15(2): 113-129. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fekonomikawan.v15i2.1036>
- Pramudya EP, Prawoto A, Hanifa R. (2015). *Menghijaukan sektor sawit melalui petani, lesson-learned Hivos untuk isu sawit berkelanjutan*. Jakarta (ID): ReneBook.
- Sahara S, Haryadi H, Kusumowardhani N. (2018). *Pembiayaan bagi petani kecil di sektor kelapa sawit: analisis kesenjangan antara skema kredit yang tersedia dan pembiayaan yang dihadapi petani kecil*. Infobrief No. 214. Bogor, Indonesia: CIFOR
- Saputra IMGD, Anggreni IGAAL, Dharma IP. (2017). Pola kemitraan usaha tani kelapa sawit kelompok tani telaga biru dengan PT. Sawindo Kencana melalui koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung. *E-jurnal Agribisnis dan Agrowisata* 6 (2) : 249-258. <https://doi.org/10.24843/JAA.2017.v06.i02.p08>
- Sibarani DYT, Hutabarat S, Dewi N. (2015). Prospek dan tantangan petani kelapa sawit swadaya di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam menghadapi sertifikasi ISPO. *Jom Faperta* 2(1): 1-15. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMF_APERTA/article/view/5468
- Suharno, Yuprin, AD., Barbara, B. (2015). Analisis kinerja usahatani perkebunan kelapa sawit rakyat melalui pola kemitraan di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Agribisnis Indonesia* 3 (2) : 135 – 144. <https://doi.org/10.29244/jai.2015.3.2.135-144>
- Sukardi. (2017). *Metodologi penelitian pendidikan: kompetensi dan praktiknya*. Jakarta (ID): Penerbit Bumi Aksara
- Wildayana E. (2016). Pendekatan pengendalian fluktuasi harga tandan buah segar terhadap pendapatan petani kelapa sawit. *Jurnal Habitat* 27(3): 103-108. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.3.12>